

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan di era globalisasi ditandai dengan persaingan yang semakin ketat di dunia usaha di semua bidang, termasuk di bidang ekonomi. Selain itu, kebutuhan setiap orang juga semakin meningkat sehingga kini banyak orang yang mendirikan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebanyakan dari mereka ingin memulai usaha sendiri dengan cepat namun terkendala dengan jumlah modal yang tidak sedikit untuk membuka usaha, terutama pada masyarakat desa yang ingin mengubah perekonomiannya dengan membuka usaha sendiri. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam implementasi pengembangan perekonomian daerah hingga pelosok desa di wilayah Indonesia. Permasalahan yang timbul pada warga desa ini menarik perhatian pemerintah untuk mendirikan suatu organisasi yang mampu membangun kondisi perekonomian masyarakat desa agar menjadi lebih baik.

Permasalahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat desa memicu munculnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu perekonomian masyarakat (Ridwan, 2014). Yang awalnya masyarakat desa mayoritas bekerja sebagai petani atau sebagai peternak dan ingin membuka usaha sendiri namun modal yang dimiliki tidak tercukupi, disinilah peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes merupakan lembaga usaha

yang didirikan di desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes menjelaskan beberapa tujuan dari BUMDes, antara lain: hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.

Di Kabupaten Buleleng, perkembangan BUMDes sudah terlihat semakin maju dan berkembang sejak dibentuk tahun 2014 (Warta Ekonomi, 2018). Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng memiliki berbagai macam jenis usaha yang dikelolanya seperti jasa simpan pinjam, toko, tempat parkir, pengelolaan sampah, wisata bahari, pariwisata, air minum, ternak, pengelolaan pasar, dan lain – lain. Jumlah BUMDes di Kabupaten Buleleng sebanyak 117 BUMDes yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng dengan aset total mencapai Rp. 97,6 M (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng, 2019). Namun dibalik perkembangan BUMDes yang semakin pesat di Kabupaten Buleleng, masih saja ada BUMDes yang bermasalah karena adanya indikasi kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Salah satu kasus kecurangan yang terjadi baru-baru ini terjadi di Kabupaten Buleleng adalah kasus kecurangan yang terjadi di akhir tahun 2019 pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak, dengan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes tersebut telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dana BUMDes sebesar Rp. 1,2 miliar. Beberapa pengurus diduga memakai dana BUMDes dengan mengajukan

pinjaman tanpa jaminan. Hal tersebut terungkap dalam musyawarah desa (Musdes) yang digelar oleh masyarakat desa (Ardi, 2019). Kasus ini dibenarkan oleh Koordinator Tim Penyehatan BUMDes, Komang Widiartawan yang menyatakan bahwa BUMDes sedang sakit. Sakitnya BUMDes terungkap sejak dibentuknya Tim 9 dengan adanya suntikan dana yang berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Gerbang Sadu Mandara, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Pemerintah Desa. Pengurus BUMDes diduga membuat pengakuan fiktif dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Nilai yang dipinjamkan pun sampai ratusan juta rupiah. Sedangkan sisa uangnya digunakan untuk operasional BUMDes (Sutiawati, 2019)

Kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pengelolaan BUMDes malah digunakan untuk kepentingan pribadi dengan memanipulasi laporan keuangan BUMDes. Hal ini tentunya akan merugikan orang lain dan dapat mencoreng nama baik dari organisasi tempat ia bekerja. Menurut Theodorus (2010) menyebutkan kecurangan akuntansi sebagai kejahatan, karena tindakan tersebut melanggar hukum yang meliputi pemanfaatan kedudukan oleh pelaku yang memiliki wewenang tinggi, dan berpengaruh dalam lembaga-lembaga tertentu, namun kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan pribadi. Sedangkan, kecurangan menurut Kurniawati (2012) merupakan suatu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki maksud atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau organisasi yang secara langsung akan merugikan orang lain. Selain itu, membocorkan informasi perusahaan kepada pihak luar

perusahaan, dan menggunakan dokumen palsu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri juga termasuk dalam tindakan *fraud*. Selain itu, menurut Purnamasari (2014), tindakan kecurangan akuntansi yang dilakukan karyawan dapat berupa pencatatan yang salah atau tidak akurat dalam buku besar atau jurnal, pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa perincian atau penjelasan pendukung, melakukan pengeluaran tanpa dokumen pendukung, kekurangan barang yang diterima, dan munculnya faktur ganda.

Kecendrungan kecurangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam organisasi seperti keefektifan penerapan sistem pengendalian internal (Devi, 2019). Lemahnya penerapan sistem pengendalian internal di dalam organisasi dapat menyebabkan tindakan kecurangan (*fraud*). Adanya penerapan sistem pengendalian internal ini didalam suatu organisasi sangat penting dalam hal pengawasan secara keseluruhan dari aktivitas organisasi, baik mengenai manajemen organisasi maupun sistem yang digunakan untuk menjalankan organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka pada laporan keuangan dan melindungi aset organisasi dari segi pembukuan, tetapi juga memperhatikan struktur organisasi dan dapat menganalisis keberhasilan dari suatu kebijakan manajemen.

Menurut Oktaviyani (2018), adanya sistem pengendalian internal yang efektif akan dapat membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, serta dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian, kecurangan (*fraud*) maupun penyimpangan. Jadi, jika organisasi mampu menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif akan

dapat meminimalisir tindakan kecurangan (*fraud*) di organisasi tersebut. Seperti halnya kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak, faktor utama yang menyebabkan adanya indikasi kecurangan diakibatkan karena lemahnya penerapan sistem pengendalian internal. Karena beberapa pengurus BUMDes diduga memakai dana BUMDes dengan mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Jika BUMDes mampu merancang sistem pengendalian internal yang efektif maka tindakan kecurangan akuntansi yang kemungkinan dapat dilakukan oleh pengurus dapat diminimalisir. Keefektifan sistem pengendalian internal pada BUMDes dapat mengontrol perilaku pengurus untuk mengikuti segala kebijakan yang berlaku pada BUMDes guna untuk mencapai keandalan laporan keuangan dan untuk meminimalisir tindakan kecurangan akuntansi. Hal ini dipertegas oleh penelitian Nadya (2016), bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, karena semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal disuatu organisasi, maka semakin rendah kecendrungan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) di dalam organisasi. Hasil penelitian Ismuadi (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun, berbeda dengan hasil penelitian Aprilliyanti (2018) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecendrungan kecurangan.

Selain harus menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, adanya tindakan kecurangan juga disebabkan karena adanya asimetri informasi pada laporan keuangan (Dewi, 2018). Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak internal perusahaan mengetahui lebih banyak informasi terkait



laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan (*stakeholder*). Jika terjadi sebuah kesenjangan antara pihak pengguna (*stakeholder*) dan pihak pengelola, maka akan membuka kesempatan bagi pihak pengelola untuk melakukan penyelewengan dana dan memanipulasi data keuangan. Pada BUMDes, asimetri terjadi antara pelaksana operasional BUMDes sebagai pengelola dana dengan masyarakat sebagai pemilik dana. Seperti pada kasus kecurangan di Kecamatan Gerokgak, pengurus BUMDes diduga membuat pengakuan fiktif dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Jika asimetri informasi terjadi, pengurus BUMDes akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka demi memperoleh kompensasi yang tinggi (Fauwzi, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian Dewi (2018) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan, karena dengan adanya asimetri informasi yang tinggi, dapat memperbesar kecenderungan kecurangan pada organisasi. Namun berbeda dengan hasil penelitian Aprilliyanti (2018) dan Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Selain faktor-faktor di atas, tekanan pada diri seseorang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Menurut Kurniawati (2012), tekanan merupakan sesuatu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidupnya, tindakan mencoba-coba, dan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Tekanan dari dalam diri seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia bekerja. Salah satu lingkungan kerja yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan adalah keadilan distributif. Keadilan tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan penghargaan (*reward*) berupa gaji atau

kompensasi lain atas pekerjaannya. Jika seorang karyawan merasa bahwa dirinya tidak diberikan keadilan di lingkungan tempat ia bekerja, maka karyawan tersebut cenderung merasa tidak puas akan pekerjaannya bahkan merasa tertekan. Jika hal tersebut terjadi, karyawan tersebut akan melakukan sesuatu agar dirinya merasa puas, seperti melakukan kecurangan berupa memanipulasi laporan keuangan. Seperti halnya pada pengurus BUMDes, jika pengurus BUMDes diberikan kompensasi yang sepadan dengan hasil kerjanya, ini akan memberikan kepuasan tersendiri dan memberikan motivasi pengurus dalam bekerja. Hal ini justru akan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi dan dapat meminimalisir tindakan kecurangan berupa penyelewengan dana BUMDes. Hal ini didukung oleh penelitian Devi (2019) bahwa keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Selain itu, hasil penelitian Rahim (2017) menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Namun berbeda dengan hasil penelitian Fachrunisa (2015) yang menyatakan keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan beberapa pandangan dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih dalam mengenai pengelolaan dana BUMDes. Karena pada dasarnya keberhasilan pengelolaan dana BUMDes harus didukung dan dilakukan secara bersama oleh banyak pihak, seperti pengurus BUMDes itu sendiri serta masyarakat desa tersebut. berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan dalam pengelolaan dana BUMDes demi tercapainya hasil yang maksimal untuk meningkatkan perekonomian desa. Peneliti

akan melakukan penelitian terkait pengaruh keefektifan penerapan sistem pengendalian internal, asimetri informasi, dan keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Variabel-variabel tersebut dipilih karena menurut beberapa peneliti sebelumnya, variabel-variabel tersebut merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk meminimalisir tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*). Untuk objek penelitiannya, peneliti melakukan penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gerokgak. Dipilihnya lokasi penelitian di Kecamatan Gerokgak karena salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Gerokgak diduga “sakit” karena terdapat permasalahan pengelolaan keuangan pada BUMDes tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian kecurangan akuntansi untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keefektifan Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) pada BUMDes se-Kecamatan Gerokgak”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain:

- 1.2.1 Tidak sedikit BUMDes yang bermasalah di Kabupaten Buleleng, terutama yang berkaitan dengan tindakan penyelewengan / penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola operasional BUMDes. Perilaku kekuasaan koruptif yang dilakukan kepala daerah karena kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi



dapat menciptakan perubahan sosial untuk masyarakat dan bahkan meniru tindakan tersebut (Berdesa.com).

- 1.2.2 Lemahnya penerapan sistem pengendalian internal di dalam organisasi dapat menyebabkan terjadinya suatu kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pengurus pada BUMDes tersebut. Hal ini tentu sangat berakibat fatal karena dapat mempengaruhi jalannya operasional BUMDes.
- 1.2.3 Adanya asimetri informasi antara pihak pengguna informasi (*stakeholder*) dengan pihak pengelola akan membuka kesempatan bagi pihak pengelola untuk melakukan penyelewengan dana dan memanipulasi data keuangan.
- 1.2.4 Adanya tekanan dalam diri seseorang dapat menyebabkan tindakan kecurangan (*fraud*). Jika seorang karyawan merasa bahwa dirinya tidak diberikan keadilan di lingkungan tempat ia bekerja, maka karyawan tersebut akan cenderung merasa tidak puas akan pekerjaannya bahkan merasa tertekan dan akan melakukan tindakan kecurangan.
- 1.2.5 Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pengurus BUMDes, karena dalam hal ini pengurus BUMDes juga memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan pengaruh keefektifan penerapan sistem pengendalian internal, asimetri informasi dan keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES se-Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. ketiga permasalahan diatas dipilih karena dengan adanya pertimbangan jika permasalahan tersebut yang dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDes.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.4.1 Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES se-Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2 Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES se-Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3 Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES se-Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES se-Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES se-Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES se-Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia akuntansi dan diharapkan mampu digunakan sebagai landasan serta perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai

pengaruh keefektifan penerapan sistem pengendalian internal, asimetri informasi dan keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDes se-Kecamatan Gerokgak.

## 1.6.2 Manfaat Praktis

### 1.6.2.1 Bagi BUMDes di Kecamatan Gerokgak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak pengurus BUMDes se-Kecamatan Gerokgak untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan organisasi terkait penerapan sistem pengendalian internal, asimetri informasi dan keadilan distributif dalam hal pemberian gaji dan kompensasi kepada pihak pengurus BUMDes.

### 1.6.2.2 Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan yang mengatur tentang BUMDes secara teoritis dan perlu mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang dibuat agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat meminimalisir tindakan kecurangan.

### 1.6.2.3 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh keefektifan Sistem Pengendalian Internal, asimetri informasi, dan keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).